

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 merupakan dokumen yang menjadi acuan pelaksanaan pembangunan selama masa periode Bupati/Wakil Bupati Sinjai Periode 2013-2018 yang sedang berjalan.

Memasuki tahun kedua pelaksanaan Renstra ini, telah dilaksanakan evaluasi/review terhadap dokumen dimaksud untuk menguji kesesuaian proses penyusunan dengan sistematika yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010. Evaluasi juga diharapkan dapat menguji kembali seluruh program yang direncanakan dan kegiatan yang telah dilaksanakan dapat betul-betul memberi kontribusi dalam upaya pencapaian visi misi Bupati/Wakil Bupati Sinjai periode 2013-2018. Dari hasil evaluasi tersebut telah dapat diperoleh kesimpulan bahwa terdapat beberapa ketidaksesuaian sistematika dan substansi dari dokumen Rencana Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018.

Dari sisi eksternal, terbitnya RPJMN Tahun 2015-2019, hasil Revisi RPJMD Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 dan juga Revisi RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 yang tentunya melahirkan berbagai kebijakan dan prioritas program Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Pemerintah Kabupaten yang penting untuk dipedomani agar sinkronisasi kebijakan dan prioritas antar pusat dan daerah tetap terjaga. Selain itu terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan secara mendasar telah merubah pelaksanaan kewenangan dan komposisi keuangan daerah seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dari beberapa pertimbangan tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai melaksanakan revisi terhadap Rencana Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018.

Dengan demikian revisi Rencana Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program dan kegiatan dengan secara terus-menerus melakukan perubahan kearah perbaikan dalam suatu tahapan yang konsisten, terukur dan berkelanjutan, sehingga masyarakat sejahtera yang dicita-citakan dapat tercapai.

Setelah melalui proses revisi, Rencana Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 diharapkan menjadi dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dapat menjadi acuan dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi menuju tercapainya visi, misi, kebijakan dan Program Bupati Sinjai Periode 2013-2018.

## **1.2 Landasan Hukum**

Revisi Rencana Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 berpedoman kepada :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah di Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4693);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4405);

12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010 – 2014, (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 11);
13. Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Menteri Keuangan Nomor : 28 Tahun 2010, Nomor 0199/MPPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 Tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2013 Tanggal 11 November 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai Tahun 2012-2032;
19. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 Kabupaten Sinjai tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai 2005-2025.
20. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 Kabupaten Sinjai tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai 2013-2018.
21. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 Kabupaten Sinjai tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai 2013-2018.
22. Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah 2016 Nomor 22 tahun 2015.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Revisi Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai adalah untuk mewujudkan visi dan mengemban misi yang berorientasi pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara lebih optimal, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang diamatkan oleh Revisi RPJMD 2013 -2018.

Adapun tujuan penyusunan Renstra ini adalah :

1. Menjadikan Revisi Renstra sebagai suatu perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam lingkup DP3AP2KB Kabupaten Sinjai
2. Mengembangkan dan meningkatkan sinergitas antar bidang lingkup DP3AP2KB dalam rangka fasilitasi pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
3. Memudahkan para stakeholder dan instansi terkait melakukan langkah-langkah adaptatif terhadap lingkungan strategis yang selalu berubah;
4. Mengembangkan dan meningkatkan komunikasi di antara stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

### **1.4 Sistematika Penyusunan Revisi Renstra**

Sistematika penulisan dokumen Revisi Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DP3AP2KB
2. Sumber Daya DP3AP2KB
3. Kinerja Pelayanan DP3AP2KB
4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DP3AP2KB

## **BAB III ISU-ISU STRATEGIS**

1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DP3AP2KB
2. Telaahaan Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3. Telaahan Renstra Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
5. Penentuan isu-isu Strategis

## **BAB IV VISI, MISI DAN TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI. STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

1. Visi dan Misi DP3AP2KB
2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD
3. Strategi dan Kebijakan

## **BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKTIF**

Berisi uraian ringkas tentang program, kegiatan, indikator kinerja serta kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Sinjai selama kurun waktu 2008-2013.

## **BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Berisi uraian ringkas tentang indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Sinjai yang menunjang pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2008-2013

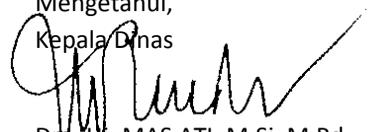
## **BAB VI PENUTUP**

## **LAMPIRAN**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2013-2018**

<b>N O</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>FORMULASI PENGUKURAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>
1	Meningkatnya implementasi pengarusutamaan gender pada SKPD Kabupaten Sinjai	Jumlah partisipasi perempuan dalam bidang pembangunan	Instansi	Jumlah perempuan yang berpartisipasi dalam bidang pemerintahan, politik dan ekonomi.	Bidang Pengarusutamaan Gender
2	Meningkatnya penyediaan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, serta pemenuhan hak anak	Presentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di kabupaten sinjai	Persentase	Jumlah kasus yang dilaporkan dibagi kasus yang ditangani dikali 100 persen	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
		Persentase persiapan sinjai menuju kabupaten layak anak.	Persentase	Persentase jumlah kegiatan yang dilaksanakan untuk persiapan penilaian Kabupaten Layak Anak	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
3	Meningkatnya kesertaan ber-KB bagi PUS (Pasangan Usia Subur)	Jumlah Peserta KB baru	Peserta KB	Jumlah Peserta KB Baru setiap tahunnya	Bidang Keluarga Berencana
		Jumlah kesertaan dalam kelompok ketahanan keluarga	Jumlah kesertaan dalam kelompok ketahanan keluarga	Jumlah kesertaan kelompok BKB,BKR,BKL,UPPKS dan PIK Remaja	Bidang Keluarga Sejahtera

Mengetahui,  
Kepala Dinas

  
Dr. Hj. MAS ATI, M.Si. M.Pd  
Pangkat: Pembina Utama Muda  
NIP. 19600721198602 2 001



## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang.**

Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah/ Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKP/RKPD) sebagai rencana kerja tahunan, yang merupakan wujud dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Sebagai penjabaran pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah/ Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKP/RKPD), maka kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Tahunan Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD).

Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Dalam melaksanakan urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengacu pada PP No. 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, sedang untuk urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera selain mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 juga mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera yang sudah tidak berlaku lagi. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 14 Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 yang menyatakan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota adalah dalam hal (1) menetapkan pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga di Kabupaten/Kota; dan (2) sosialisasi, advokasi, dan koordinasi pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan, aspirasi dan kemampuan masyarakat setempat. Sedangkan untuk pembiayaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga di daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (pasal 16, UU No. 52 Tahun 2009).

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Pemerintah Kabupaten Sinjai, merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan tugas melaksanakan urusan wajib pemerintah Kabupaten di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Berkenaan dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, tugas ini sudah barang tentu berkaitan erat dengan agenda strategis dan prioritas dari Pemerintah Kabupaten Sinjai, terutama terkait erat dengan obyek Pembangunan yaitu Penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam

pembangunan berkelanjutan serta Perempuan dan Anak yang merupakan faktor penting dalam penyelesaian masalah pembangunan dan penentu masa depan bangsa dan negara. Hal ini dapat dilihat keterkaitannya dari jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antar kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta jumlah penduduk perempuan yang lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki namun belum menjadikan suatu kekuatan dalam pembangunan karena belum terayomi dan terlindunginya hak-hak perempuan perempuan demikian juga anak. Untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang lebih tinggi perlu ditunjang dengan kebijakan-kebijakan yang sesuai, termasuk kebijakan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera .

Keberhasilan Pelaksanaan program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana akan bermuara pada kesetaraan, dan keadilan gender keseimbangan daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan, serta pada peningkatan kualitas penduduk dan sumber daya manusia. Memasuki era otonomi daerah (UU No. 32 tahun 2004), diharapkan penanganan program Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak, kependudukan dan Keluarga Berencana semakin sistimatis, terorganisir, terkoordinasi dan berkelanjutan sehingga akan dapat dicapai hasil yang lebih optimal dengan prinsip efisien dan efektif.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Renja Perubahan OPD mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Oleh karena itu RKPD dan Renja OPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Organisasi Perangkat Daerah.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai adalah:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah di Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan

- Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4693);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4815);
  8. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4405);
  10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010 – 2014, (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 11);
  11. Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  13. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Dinas Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Menteri Keuangan Nomor : 28 Tahun 2010, Nomor 0199/MPPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 Tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017
  15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;

16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2013 Tanggal 11 November 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai Tahun 2012-2032;
18. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 Kabupaten Sinjai tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai 2005-2025.
19. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 Kabupaten Sinjai tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai 2013-2018.
20. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 Kabupaten Sinjai tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai 2013-2018.
21. Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah 2016 Nomor 22 tahun 2015.
22. Keputusan Bupati Sinjai Nomor 1582 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2013-2018 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai dimaksudkan:

1. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program / kegiatan selama 1 (satu) tahun dan sebagai penjabaran Revisi Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

2. Mensinergikan hasil Musrenbang dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai fungsi dan peran.
3. Mendiskripsikan fungsi dan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai adalah sebagai dokumen perencanaan dan acuan kerja program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai untuk Tahun 2017.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai tahun 2017, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Renja DP3AP2KB, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

##### **1.1. Latar Belakang**

Memuat tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen Revisi RKPD dan Revisi Renstra OPD.

##### **1.2. Landasan Hukum**

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam penyusunan Renja DP3AP2KB Tahun 2017.

##### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

##### **1.4. Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU**

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja OPD Tahun 2015 dan perkiraan capaian tahun 2017.

- 1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu dan Capaian Renstra OPD.
- 1.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD.
- 1.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 1.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 1.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan.

## **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD

- 3.3. Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

## **BAB IV PENUTUP**

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

## II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

### 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

Evaluasi capaian renja 2015

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2014		Target kinerja renja Tahun 2015		Realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan 2015		
						Realisasi kinerja renja		Realisasi tingkat capaian kinerja (%)
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		6=(5/4)
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>							
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik unntuk mendukung pelaksanaan kerja	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya Pengesahan Pajak Kendaraan Dinas/operasional	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100
Pengelolaan Keuangan OPD	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Lisrtik	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100
Pelayanan Administrasi Kesekretariatan	Tersedianya Alat dan Bahan Pendukung Pelaksanaan Pelayanan Kesekretariatan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar Daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			3	unit	3	unit	100.00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4	unit	6	unit	6	unit	100.00
Pengadaan Mebeleur	Tersedianya mebeleur kantor	2	buah	10	buah	10	buah	100.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	12	bulan	12	Bulan	12	Bulan	100.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terwujudnya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100.00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
Pengadaan pakaian dinas harian	tersedianya Pakaian Dinas bagi aparatur			22	pasang	22	pasang	100.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
Bimbingan Teknis Implemetasi Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya anggaran untuk mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	8	orang	6	orang	6	orang	100.00
Penilaian dan Penetapan Angka Kredit bagi Penyuluh	Terlaksananya Penilaian dan Penetapan Angka Kredit bagi penyuluh KB	20	orang	19	orang	19	orang	100.00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Terlaksananya Penyusunan LAKIP OPD	1	dok	1	dok	1	dok	100.00
Penyusunan Dokumen Perencanaan OPD	Terlaksananya Penyusunan Renja,RKA,DPA,dan DPPA OPD	4	dok	6	dok	6	dok	100.00
Program Keluarga Berencana								

Harganas	Terwujudnya pelaksanaan Hari Keluarga Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional	1	kali	1	kali	1	kali	100.00
Pendataan Keluarga	Terlaksananya Pendataan Keluarga di Kabupaten Sinjai	1	kali	1	kali	1	kali	100.00
Pelayanan TNI Manunggal KB-KES	Terlayaninya Peserta KB Baru dan Peserta KB Aktif	1	Keg	1	Keg	1	Keg	100.00
Kesatuan gerak PKK	Terlayaninya Peserta KB Baru dan Peserta KB Aktif	1	Keg	1	Keg	1	Keg	100.00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang KB	Tersedianya Balai Penyuluhan KB di Tingkat Kecamatan	1	paket	6	paket	6	paket	100.00
Penyediaan Biaya Operasional UPTD/Koordinator PKB	Terlaksananya Operasional UPTD dan Koordinasi PKB Kecamatan	0	bulan	12	Bulan	12	Bulan	100.00
<b>Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>								
Sosialisasi PUG Penentu kebijakan Semua Sektor	Terlaksananya Sosialisasi PUG bagi Penentu Kebijakan	0	kali	2	kali	2	kali	100.00
Penguatan Focal Point PUG	Terwujudnya Penguatan Focal Point PUG di setiap OPD	0	kali	1	kali	1	kali	100.00
Penyelenggaraan Data Gender dan Anak	Terlaksananya Pendataan secara terpisah Gender dan Anak	0	dok	1	dok	1	dok	100.00
<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b>								
Pelatihan keterampilan bagi kelompok perempuan	Terlaksananya Pelatihan Keterampilan bagi Kelompok Perempuan	1	kali	1	kali	1	kali	100.00
Fasilitasi P2TP2A	Terlaksananya Pendampingan Kasus Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100.00
Penguatan dan Pengembangan Jejaring Perlindungan Perempuan dan Anak	Terlaksananya Penusunan Regulasi Terkait Perlindungan Perempuan dan Anak	0	dok	1	dok	1	dok	100.00
<b>Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan</b>								

Pembinaan Organisasi Perempuan	Terlaksananya Pelatihan ,Sosialisasi,Seminar dan Penyuluhan yang Mendukung Peningkatan Kapasitas SDM Pengurus dan Anggota DWP Sinjai	0 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100.00
Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari Ibu Tk. Kabupaten Sinjai	Terlaksananya Peringatan Hari Ibu Tingkat Kabupaten Sinjai	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100.00
<b>Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak</b>						
Penguatan dan pengembangan forum anak Kabupaten Sinjai	Terbentuknya Forum Anak di Tingkat Kecamatan	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	100.00
Gebyar kreatifitas anak	Terlaksananya Gebyar Kreatifitas Anak di Bidang Pendidikan,Seni,dan Budaya	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	100.00
<b>Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR</b>						
Pelatihan Calon Fasilitator PIK Remaja	Terlaksananya Pelatihan Calon Fasilitator PIK Remaja	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	100.00
<b>Program Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Perempuan</b>						
Pelatihan Kepemimpinan Bagi Pengurus Organisasi Perempuan	Tersedianya SDM yang mampu mengelola organisasi secara profesional	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	100.00
<b>Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga</b>						
Pembinaan Kelompok BKB, BKR dan BKL	Terlaksananya Pembinaan Kader Kelompok BKB,BKR dan BKL	0 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100.00

Alokasi anggaran untuk Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB untuk tahun 2015 adalah sebesar Rp. 3.401.172.350 dan realisasinya adalah Rp. 3.363.069.401 ,- dengan persentase serapan anggaran untuk tahun 2015 sebesar 98,88%

## **2.2. ANALISIS KINERJA**

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten. Meskipun sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan telah dibuat untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota antara lain oleh kebijakan perencanaan yang tertuang dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang dikenal sebagai proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Meskipun sistem Musrenbang telah dikembangkan lebih baik, dalam rangka menerpadukan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota masih belum optimal.

Melihat kondisi tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai selaku Dinas perencana mencoba untuk mensinergikan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten dalam rangka:

1. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan.
2. Membangun terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkendali, dan berkelanjutan.

### 2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai mengambil strategi untuk ikut menyelesaikan permasalahan yang ada sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam berbagai bidang pembangunan melalui pelatihan analisis gender bagi perencana OPD;
2. Melakukan penguatan Kelembagaan PUG melalui penguatan Focal Point PUG di masing-masing OPD;
3. Meningkatkan peran dan fungsi Pusat Pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak sebagai wadah perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
4. Mengintegrasikan pemenuhan hak partisipatif anak dalam setiap kebijakan pembangunan melalui penguatan dan pengembangan forum anak.
5. Meningkatkan kapasitas penguatan pelebagaan keluarga kecil berkualitas, pembinaan dan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB Mandiri;
6. Meningkatkan partisipasi kelompok Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia serta mengembangkan advokasi dan KIE dalam rangka peningkatan ketahanan keluarga;

Dengan melaksanakan 6 (enam) isu strategi tersebut diatas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai berperan serta mengatasi permasalahan dari mulai tingkat dasar yaitu mulai dari manusia lahir sampai kepada peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, demikian pula peningkatan kualitas keluarga, melalui pelaksanaan **2 (dua) Urusan Wajib** yaitu: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; yang dijabarkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diurutkan sesuai prioritas.

#### **2.4. RANCANGAN AWAL RKPD**

Rancangan awal RKPD merupakan kerangka awal pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah yang didapat dan berhasil dikumpulkan dari masyarakat, stake holder, dan pemerintah sendiri. Rancangan awal RKPD merupakan kunci penting dalam menentukan kualitas seluruh proses penyusunan RKPD. Rancangan awal menginformasikan rancangan kerangka ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, arah prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja program dan kegiatan yang dilengkapi dengan rancangan pagu indikatif untuk setiap OPD untuk tahun yang direncanakan sebagai acuan bagi setiap OPD dalam menyiapkan rancangan RENJA OPD. Rancangan Awal RKPD berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan untuk tahun yang direncanakan.

Review rancangan awal RKPD 2017 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai dapat dilihat dari analisis kebutuhan program/kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai tahun 2017 dengan menganalisis lokasi, indikator kinerja, target capaian, serta kebutuhan dana dengan catatan penting.

#### **2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai Tahun 2017 merupakan rencana kerja tahun penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan didalam dokumen Rencana Strategis Revisi (Renstra) Tahun 2013-2018. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai Tahun 2017 disusun dengan mengacu

pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017. Sejalan dengan kebijakan pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan, tolak ukur kinerja pembangunan dilakukan melalui pengukuran 14 indikator makro (makro ekonomi dan makro sosial), yang menempatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan evaluasi kebijakan pembangunan.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Disisi lain, dalam era globalisasi, DP3AP2KB dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik dan responsif gender sehingga mampu mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup perempuan, dan kemakmuran rakyat.

Proses penyusunan Renja DP3AP2KB Tahun 2017 tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan, serta memperhitungkan efektifitas pelaksanaan kegiatan yang telah dimuat pada Renja 2017.

### **III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1. TELAAH KEBIJAKAN NASIONAL**

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Daerah berkepentingan untuk memberikan kontribusi terhadap upaya pemecahan permasalahan yang berkaitan pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana, serta keluarga sejahtera.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai harus menetapkan kebijakan dan memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi kaum perempuan untuk membentuk jati dirinya secara proporsional dan bertanggungjawab, dengan memperluas aksesibilitas, memperkuat partisipasi dan peran kontrol, serta memberikan ruang seluas-luasnya untuk mengenyam manfaat pembangunan dari seluruh aspek kehidupan serta menekan dan semaksimal mungkin menghilangkan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Secara konseptual Visi dan Misi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana senantiasa bermuara kepada ketercapaian kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan ber-negara dan sejalan dengan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai yakni Terwujudnya Sinjai Bersatu yang Sejahtera, Unggul dalam Kualitas Hidup, terdepan dalam Pelayanan Publik, maka ditetapkan Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2013-2018, yakni :

## 1.6. VISI

Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai yaitu :

**“ PEREMPUAN DAN KELUARGA PILAR UTAMA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN MASYARAKAT RELIGIUS, CERDAS, SEHAT DAN SEJAHTERA ”**

Dari visi diatas dapat dijelaskan bahwa makna yang dapat diambil yaitu : (1) perempuan perlu mendapat perhatian khusus dalam pembangunan, (2) keluarga sebagai unit terkecil pilar masyarakat sebagai sasaran strategis pembangunan, dan (3) Masyarakat religius berarti terkemuka dalam syiar islam dimana masyarakat Sinjai mengamalkan ajaran dan nilai-nilai keagamaan, berakhlakul karimah serta senantiasa menjaga keutuhan, kebersamaan dan kekeluargaan dalam kehidupan sehari-hari. **Cerdas** berarti masyarakat Sinjai terkemuka dalam pendidikan, memiliki kemampuan dan kematangan baik secara intelektual, spritual maupun emosional dalam membangun hubungan antar pribadi kelompok serta dalam mengelola potensi lokal secara optimal, arif dan bijaksana, **Sehat** berarti masyarakat Sinjai terkemuka dalam derajat kesehatan lahir dan bathin di Kabupaten Sinjai, sehat juga berarti bahwa pengelolaan manajemen pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik, **Sejahtera** berarti masyarakat Sinjai memiliki tingkat kehidupan ekonomi maju baik dalam kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan pendapatan melalui pemanfaatan potensi lokal, serta jaminan ketersediaan sarana perasarana penunjang ekonomi yang dapat mendorong dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

## 1.7. MISI

Misi merupakan tujuan utama kearah mana perencanaan/program Intansi Pemerintah ingin dicapai. Misi OPD adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi OPD. Untuk mencapai visi tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai telah menetapkan misi sebagai berikut :

### **Misi 1.**

**Mewujudkan keserasian kebijakan dan penatalaksanaan strategi pembangunan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan keluarga, serta kesejahteraan dan perlindungan anak.**

### **Misi 2.**

**Mewujudkan harmonisasi koordinasi, pembinaan teknis operasional, dan fasilitasi yang sinergi dalam rangka pemberdayaan perempuan dan keluarga, serta kesejahteraan dan perlindungan anak yang berperspektif gender**

### **Misi 3.**

**Mewujudkan kemitraan dan keterpaduan peran stakeholders dalam pemberdayaan perempuan, peningkatan kualitas keluarga, serta pembangunan kesejahteraan dan perlindungan anak.**

## 3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA

Rencana Kinerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) yang mencakup periode tahunan. Rencana Kerja menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2013 - 2018.

Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai berdasarkan

misi yang telah ditetapkan yang akan dicapai pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

**MISI 1 :**

**Mewujudkan keserasian dukungan kebijakan dan penatalaksanaan strategi pembangunan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan keluarga, serta kesejahteraan dan perlindungan anak.**

**Tujuan :**

Meningkatkan angka partisipasi perempuan dalam bidang pembangunan dengan mengimplementasikan pengarusutamaan gender pada semua sektor

**Sasaran :**

Meningkatnya implementasi pengarus utamaan gender pada OPD kabupaten Sinjai

**Program :**

Program Penguatan Kelembagaan PUG

**MISI 2 :**

**Mewujudkan pembinaan teknis operasional, dan fasilitasi yang sinergi dalam rangka pengembangan pemberdayaan perempuan dan keluarga, serta kesejahteraan dan perlindungan anak yang berperspektif gender.**

**Tujuan :**

Meningkatkan cakupan penanganan pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

**Sasaran :**

- Tersedianya layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, serta pemenuhan hak anak
- Meningkatnya kualitas tumbuh kembang dan partisipasi anak dalam pembangunan

**Program :**

1. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perlindungan Perempuan dan Anak
2. Program Pelayanan administrasi perkantoran.
3. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
4. Program peningkatan disiplin aparatur
5. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

6. Program peningkatan pengembangan system Laporan capaian kinerja dan keuangan.

**MISI 3 :**

**Meningkatkan penguatan fasilitasi, pemberdayaan untuk mendorong tumbuhnya partisipasi, swadaya, kemandirian keluarga dan masyarakat.**

**Tujuan :**

Meningkatkan Kepesertaan KB dan Ketahanan Keluarga

**Sasaran :**

- Meningkatnya kesertaan ber-KB bagi PUS (Pasangan Usia Subur)
- Meningkatnya Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga

**Program**

1. Program Pembinaan Ketahanan Keluarga
2. Program Keluarga Berencana

<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik</li> <li>➤ Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional</li> <li>➤ Pengelolaan Keuangan OPD</li> <li>➤ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</li> <li>➤ Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</li> <li>➤ Pelayanan Administrasi Kesekretariatan</li> <li>➤ Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar daerah</li> </ul>
<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>
<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor</li> <li>➤ Pengadaan Peralatan Gedung Kantor</li> <li>➤ Pengadaan Mebeleur</li> <li>➤ Pemeliharaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor</li> <li>➤ Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</li> <li>➤ Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor</li> </ul>
<b>PROGRAM</b>	KEGIATAN
<b>Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pengadaan Mesin/Kartu Absensi</li> </ul>
<b>PROGRAM</b>	KEGIATAN
<b>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan</li> <li>➤ Penilaian dan Penetapan Angka Kredit bagi Penyuluh KB</li> </ul>
<b>PROGRAM</b>	KEGIATAN
<b>Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD</li> <li>➤ Penyusunan Dokumen Perencanaan OPD</li> </ul>
<b>PROGRAM</b>	KEGIATAN
<b>Kesetaraan dan data Gender</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Penguatan Focal Point PUG</li> <li>➤ Up Dating Data Terpilah</li> <li>➤ Fasilitasi Temu Organisasi Perempuan Tingkat Kabupaten</li> <li>➤ Peningkatan peran serta organisasi perempuan</li> </ul>
<b>PROGRAM</b>	KEGIATAN
<b>Peningkatan Kualitas Hidup Perlindungan Perempuan dan Anak</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Fasilitasi P2TP2A</li> <li>➤ Penguatan dan Pengembangan Forum Anak Kabupaten Sinjai</li> <li>➤ Fasilitasi Program Kabupaten Layak Anak</li> </ul>
<b>PROGRAM</b>	KEGIATAN
<b>Pembinaan Pengendalian penduduk, penyuluhan dan Penggerakan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Temu Kader Pengelola Program KKBPK</li> <li>➤ Biaya Operasional Integrasi Program KKBPK pada Kampung KB</li> <li>➤ Pemutahiran Data Keluarga</li> <li>➤ Penyediaan Biaya Operasional Balai Penyuluhan</li> </ul>

	KB ➤ Penguatan Lini Lapangan Keluarga Berencana
PROGRAM	KEGIATAN
<b>Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pemutahiran Data Keluarga</li> <li>➤ Pelayanan TNI Manunggal KB KES</li> <li>➤ Pelayanan Kesatuan Gerak PKK</li> <li>➤ Peningkatan Sarana Pelayanan dan Penyuluhan KB</li> <li>➤ Penyediaan Biaya Operasional</li> <li>➤ Distribusi Alat Kontrasepsi</li> </ul>

### 3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN 2017

Adapun rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai pada tahun 2017, dapat dilihat dari tabel berikut:

KODE REKENING	PROGRAM KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF
					HASIL PROGRAM		KEGIATAN/OUTPUT		
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	
1	2	3	4		5	6	7	8	
	<b>PELAYANAN ADMINISTRASI KESEKERTARIATAN</b>								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	<b>PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>SEKERTARIAT DP3AP2KB</b>		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran yang Terpenuhi	<b>80%</b>			<b>431.040.000</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			DP3AP 2KB			Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	<b>12 bulan</b>	9.300.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			DP3AP 2KB			jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapatkan pengesahan kelengkapan	<b>12 bulan</b>	17.000.000
	Pengelolaan Keuangan OPD			DP3AP 2KB			Pengelolaan Keuangan OPD dalam satu tahun	<b>12 bulan</b>	91.000.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor			DP3AP 2KB			jumlah Komponen Instalasi Listrik yang disediakan dalam setahun	<b>12 bulan</b>	1.980.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			DP3AP 2KB			Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan dalam setahun	<b>12 bulan</b>	2.760.000

								Pelayanan Administrasi Kesekretariatan			DP3AP 2KB				Pelayanan administrasi kesekretariatan selama setahun	<b>12 bulan</b>	109.000.000
								Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar Daerah			DP3AP 2KB				biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang digunakan dalam satu tahun	<b>12 bulan</b>	200.000.000
								<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>						<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	80%		<b>138.900.000</b>
								Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			DP3AP 2KB				Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	<b>3 buah</b>	16.500.000
								Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			DP3AP 2KB				Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	<b>5 unit</b>	15.500.000
								Pengadaan Mebeleur			DP3AP 2KB				Jumlah Moubeler yang diadakan	<b>9 buah</b>	10.000.000
								Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			DP3AP 2KB				jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapatkan pemeliharaan dalam setahun	<b>19 unit</b>	77.400.000
								Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			DP3AP 2KB				jumlah perlengkapan Gedung kantor yang mendapatkan pemeliharaan dalam setahun	<b>4 unit</b>	2.500.000
								Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			DP3AP 2KB				jumlah peralatan Gedung kantor yang mendapatkan pemeliharaan dalam setahun	<b>14 unit</b>	7.000.000











## **IV. PENUTUP**

### **4.1. CATATAN PENTING DALAM PENYUSUNAN RENJA**

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Revisi Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam revisi rencana kerja DP3AP2KB Tahun 2017 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang telah dilaksanakan di DP3AP2KB Sinjai, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui tahapan forum Organisasi Perangkat Daerah dibawah lingkup Dinas Perencanaan Pembangunan Daerah Sinjai, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor.

## **4.2. KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN**

Sehubungan dengan itu terbitnya Permendagri 54 tahun 2010, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja DP3AP2KB Tahun 2017 sebagai berikut:

1. Di dalam penyusunan Renja DP3AP2KB Kabupaten Sinjai Tahun 2017 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
2. Rencana Kerja DP3AP2KB Tahun 2017 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJM, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD provinsi, RPJP Kabupaten, Revisi RPJMD Kabupaten, Revisi RKPD Kabupaten Sinjai dan Revisi Renstra Dinas).

## **4.3. RENCANA TINDAK LANJUT**

1. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
2. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.

3. Menerapkan sistem *reward and punishment* terhadap seluruh aparat dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
4. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan OPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.
5. Meningkatkan pesan serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
6. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditentukan.























]





## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga penyusunan Rencana kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Sinjai tahun 2017 dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Penyusunan RENJA tahun 2017 ini didasarkan atas pelaksanaan kegiatan yang mengarah pada program dan kegiatan yang tertuang pada Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2013–2018 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai.

Demikian yang dapat kami sampaikan, dengan harapan masukan dan saran serta petunjuk. Akhirnya dengan memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT, semoga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sinjai dapat melaksanakan tugas dan pengabdian sesuai dengan target kinerja yang tertuang pada Renja 2017 ini dengan sebaik-baiknya serta mampu meningkatkan prestasi kerja pada tahun-tahun berikutnya.

Sinjai,

Kepala Dinas Pemberdayaan  
Perempuan, Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga  
Berencana Kab. Sinjai

Ir. Hj. MARWATIAH, M.Si  
Pangkat : Pembina Utama Muda



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

*Jl. Jend. Ahmad Yani No. 1 Sinjai 92611*

---

---

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJATAHUN 2018

DALAM RANGKA MEWUJUDKAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF TRANSPARAN DAN AKUNTABEL SERTA BERORIENTASI PADA HASIL KAMI YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :

NAMA : Dra. Hj. MAS ATI, M.Si, M.Pd

JABATAN : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA

SELANJUTNYA DISEBUT PIHAK PERTAMA

NAMA : H.SABIRIN YAHYA, S.Sos

JABATAN : BUPATI SINJAI

SELAKU ATASAN PIHAK PERTAMA SELANJUTNYA DISEBUT PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA BERJANJI MEWUJUDKAN TARGET KINERJA YANG SEHARUSNYA SESUAI LAMPIRAN PERJANJIAN INI, DALAM RANGKA MENCAPAI TARGET KINERJA JANGKA MENENGAH SEPerti YANG TELAH DITETAPKAN DALAM DOKUMEN PERENCANAAN.

KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA TERSEBUT MENJADI TANGGUNG JAWAB KAMI.

PIHAK KEDUA AKAN MELAKUKAN SUPERVISI YANG DILAKUKAN SERTA AKAN MELAKUKAN EVALUASI TERHADAP CAPAIAN KINERJA DARI PERJANJIAN INI DAN MENGAMBIL TINDAKAN YANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI.

SINJAI, FEBRUARI 2018

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

**H.SABIRIN YAHYA, S.Sos**

**Dra. Hj. MAS ATI, M.Si, M.Pd**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya implementasi pengarus utamaan gender pada SKPD kabupaten Sinjai	Jumlah Partisipasi perempuan dalam bidang pembangunan	6.200 orang
2	Meningkatnya penyediaan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, serta pemenuhan hak anak	Presentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di kabupaten sinjai	100%
		Persentase persiapan sinjai menuju kabupaten layak anak.	100%
3	Meningkatnya kesertaan ber-KB bagi PUS (Pasangan Usia Subur)	Rasio Akseptor KB	2.450 peserta baru
4	Meningkatnya Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Jumlah kesertaan dalam kelompok ketahanan keluarga	BKB : 3.100 BKR : 2.000 BKL : 1.700 UPPKS : 200 PIK R : 940

PROGRAM(a)	ANGGARAN(b)	KETERANGAN(c)
Belanja Tidak Langsung	Rp 3.276.170.449	100%
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 463.032.000	100%
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 147.400.000	100%
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 4.000.000	100%
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 11.050.000	100%
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 85.763.000	100%
6. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rp 164.950.000	100%
7. Program Kesetaraan dan Data Gender	Rp 123.675.000	100%
8. Program Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan	Rp 2.630.106.000	100%
9. Program Keluarga Berencana	Rp 876.134.000	100%
Total	Rp 7.782.280.449	

SINJAI, FEBRUARI 2018

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

**H.SABIRIN YAHYA, S.Sos**

**Dra. Hj. MAS ATI, M.Si, M.Pd**



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
*Jl. Jend. Ahmad Yani No. 1 Sinjai 92611*

---

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJATAHUN 2018

DALAM RANGKA MEWUJUDKAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF TRANSPARAN DAN AKUNTABEL SERTA BERORIENTASI PADA HASIL KAMI YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :

NAMA : Dra. A. BUNGA MAWAR, S

JABATAN : SEKERTARIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA

SELANJUTNYA DISEBUT PIHAK PERTAMA

NAMA :Dra. Hj. MAS ATI, M.Si, M.Pd

JABATAN : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA

SELAKU ATASAN PIHAK PERTAMA SELANJUTNYA DISEBUT PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA BERJANJI MEWUJUDKAN TARGET KINERJA YANG SEHARUSNYA SESUAI LAMPIRAN PERJANJIAN INI, DALAM RANGKA MENCAPAI TARGET KINERJA JANGKA MENENGAH SEPERTI YANG TELAH DITETAPKAN DALAM DOKUMEN PERENCANAAN.

KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA TERSEBUT MENJADI TANGGUNG JAWAB KAMI.

PIHAK KEDUA AKAN MELAKUKAN SUPERVISI YANG DILAKUKAN SERTA AKAN MELAKUKAN EVALUASI TERHADAP CAPAIAN KINERJA DARI PERJANJIAN INI DAN MENGAMBIL TINDAKAN YANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SAKSI.

SINJAI, FEBRUARI 2018

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

**Dra. Hj. MAS ATI, M.Si, M.Pd**

**Dra. A. BUNGA MAWAR, S**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1	2	3	4
	Meningkatnya penyediaan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, serta pemenuhan hak anak	Persentase persiapan sinjai menuju kota layak anak.	100%

<b>PROGRAM(a)</b>	<b>ANGGARAN(b)</b>	<b>KETERANGAN(c)</b>
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 463.032.000	
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp147.400.000	
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp4.000.000	
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp11.050.000	
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp85.763.000	

SINJAI, FEBRUARI 2018

KEPALADINAS  
PEMBERDAYAAN  
PEREMPUANPERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

SEKERTARISDINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUANPERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

**Dra. Hj. MAS ATI, M.Si, M.Pd**

**Dra. A. BUNGA MAWAR, S**



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

*Jl. Jend. Ahmad Yani No. 1 Sinjai 92611*

---

---

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJATAHUN 2018

DALAM RANGKA MEWUJUDKAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF TRANSPARAN DAN AKUNTABEL SERTA BERORIENTASI PADA HASIL KAMI YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :

NAMA : IKA MAYASARI. SS

JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM

SELANJUTNYA DISEBUT PIHAK PERTAMA

NAMA : Dra. A. BUNGA MAWAR, S

JABATAN : SEKERTARIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA

SELAKU ATASAN PIHAK PERTAMA SELANJUTNYA DISEBUT PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA BERJANJI MEWUJUDKAN TARGET KINERJA YANG SEHARUSNYA SESUAI LAMPIRAN PERJANJIAN INI, DALAM RANGKA MENCAPAI TARGET KINERJA JANGKA MENENGAH SEPERTI YANG TELAH DITETAPKAN DALAM DOKUMEN PERENCANAAN.

KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA TERSEBUT MENJADI TANGGUNG JAWAB KAMI.

PIHAK KEDUA AKAN MELAKUKAN SUPERVISI YANG DILAKUKAN SERTA AKAN MELAKUKAN EVALUASI TERHADAP CAPAIAN KINERJA DARI PERJANJIAN INI DAN MENGAMBIL TINDAKAN YANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SAKSI.

SINJAI, FEBRUARI 2018

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

**Dra. A. BUNGA MAWAR, S**

**IKA MAYASARI. SS**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
	Meningkatnya penyediaan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, serta pemenuhan hak anak	Persentase persiapan sinjai menuju kota layak anak.	100%

KEGIATAN(a)	ANGGARAN(b)	KETERANGAN(c)
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp5.815.000	100%
2. Monitoring Evaluasi Kinerja	Rp 40.500.000	100%
3. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Rp39.448.000	100%

SINJAI, FEBRUARI 2018

SEKERTARIS  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KB

KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM

**Dra. A. BUNGA MAWAR, S**

**IKA MAYASARI, SS**



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

*Jl. Jend. Ahmad Yani No. 1 Sinjai 92611*

---

---

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJATAHUN 2018

DALAM RANGKA MEWUJUDKAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF TRANSPARAN DAN AKUNTABEL SERTA BERORIENTASI PADA HASIL KAMI YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :

NAMA : HAJRAH, SE. M.Si

JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

SELANJUTNYA DISEBUT PIHAK PERTAMA

NAMA : Dra. A. BUNGA MAWAR, S

JABATAN : SEKERTARIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA

SELAKU ATASAN PIHAK PERTAMA SELANJUTNYA DISEBUT PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA BERJANJI MEWUJUDKAN TARGET KINERJA YANG SEHARUSNYA SESUAI LAMPIRAN PERJANJIAN INI, DALAM RANGKA MENCAPAI TARGET KINERJA JANGKA MENENGAH SEPerti YANG TELAH DITETAPKAN DALAM DOKUMEN PERENCANAAN.

KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA TERSEBUT MENJADI TANGGUNG JAWAB KAMI.

PIHAK KEDUA AKAN MELAKUKAN SUPERVISI YANG DILAKUKAN SERTA AKAN MELAKUKAN EVALUASI TERHADAP CAPAIAN KINERJA DARI PERJANJIAN INI DAN MENGAMBIL TINDAKAN YANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SAKSI.

SINJAI, FEBRUARI 2018

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

**Dra. A. BUNGA MAWAR, S**

**HAJRAH, SE. M.Si**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
	Meningkatnya penyediaan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, serta pemenuhan hak anak	Persentase persiapan sinjai menuju kota layak anak.	100%

KEGIATAN(a)	ANGGARAN(b)	KETERANGAN(c)
1. Pengelolaan Keuangan SKPD	Rp114.812.000	
2. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar Daerah	Rp233.000.000	

SINJAI, FEBRUARI 2018

SEKERTARIS  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KB

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

**Dra. A. BUNGA MAWAR, S**

**HAJRAH, SE. M.Si**



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
*Jl. Jend. Ahmad Yani No. 1 Sinjai 92611*

---

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJATAHUN 2018

DALAM RANGKA MEWUJUDKAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF TRANSPARAN DAN AKUNTABEL SERTA BERORIENTASI PADA HASIL KAMI YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :

NAMA : A. AHDANIAH, S. Sos. M.AP

JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SELANJUTNYA DISEBUT PIHAK PERTAMA

NAMA : Dra. A. BUNGA MAWAR, S

JABATAN : SEKERTARIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA

SELAKU ATASAN PIHAK PERTAMA SELANJUTNYA DISEBUT PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA BERJANJI MEWUJUDKAN TARGET KINERJA YANG SEHARUSNYA SESUAI LAMPIRAN PERJANJIAN INI, DALAM RANGKA MENCAPAI TARGET KINERJA JANGKA MENENGAH SEPerti YANG TELAH DITETAPKAN DALAM DOKUMEN PERENCANAAN.

KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA TERSEBUT MENJADI TANGGUNG JAWAB KAMI.

PIHAK KEDUA AKAN MELAKUKAN SUPERVISI YANG DILAKUKAN SERTA AKAN MELAKUKAN EVALUASI TERHADAP CAPAIAN KINERJA DARI PERJANJIAN INI DAN MENGAMBIL TINDAKAN YANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SAKSI.

SINJAI, FEBRUARI 2018

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Dra. A. BUNGA MAWAR, S

A. AHDANIAH, S. Sos. M.AP

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
	Meningkatnya penyediaan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, serta pemenuhan hak anak	Persentase persiapan sinjai menuju kota layak anak.	100%

KEGIATAN(a)	ANGGARAN(b)	KETERANGAN(c)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 24.480.000,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp 17.000.000,00	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 1.980.000,00	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 2.760.000,00	
Pelayanan Administrasi Kesekretariatan	Rp 69.000.000,00	
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Rp 23.000.000,00	
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Rp 4.500.000,00	
Pengadaan Mebeleur	Rp 25.000.000,00	
Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung Kantor	Rp 6.400.000,00	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Rp 73.000.000,00	
Pemeliharaan rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Rp 2.500.000,00	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Rp 7.000.000,00	
Pengadaan Instalasi Listrik	Rp 6.000.000,00	
Pengadaan mesin/Kartu Absensi	Rp 4.000.000,00	
Penilaian dan Penetapan Angka Kredit bagi Penyuluh KB	Rp 11.050.000,00	

SINJAI, FEBRUARI 2018

SEKERTARIS  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KB

KEPALA SUB BAGIAN  
UMUM DAN KEPEGAWAIAN

**Dra. A. BUNGA MAWAR, S**

**A. AHDANIAH, S. Sos. M.AP**



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
*Jl. Jend. Ahmad Yani No. 1 Sinjai 92611*

---

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJATAHUN 2018

DALAM RANGKA MEWUJUDKAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF TRANSPARAN DAN AKUNTABEL SERTA BERORIENTASI PADA HASIL KAMI YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :

NAMA : HJ. SUKMAWATI, S.STP, MM

JABATAN : KEPALA BIDANG KESETARAAN DAN DATA GENDER

SELANJUTNYA DISEBUT PIHAK PERTAMA

NAMA : Dra. Hj. MAS ATI, M.Si, M.Pd

JABATAN : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA

SELAKU ATASAN PIHAK PERTAMA SELANJUTNYA DISEBUT PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA BERJANJI MEWUJUDKAN TARGET KINERJA YANG SEHARUSNYA SESUAI LAMPIRAN PERJANJIAN INI, DALAM RANGKA MENCAPAI TARGET KINERJA JANGKA MENENGAH SEPERTI YANG TELAH DITETAPKAN DALAM DOKUMEN PERENCANAAN.

KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA TERSEBUT MENJADI TANGGUNG JAWAB KAMI.

PIHAK KEDUA AKAN MELAKUKAN SUPERVISI YANG DILAKUKAN SERTA AKAN MELAKUKAN EVALUASI TERHADAP CAPAIAN KINERJA DARI PERJANJIAN INI DAN MENGAMBIL TINDAKAN YANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SAKSI.

SINJAI, FEBRUARI 2018

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

**Dra. Hj. MAS ATI, M.Si, M.Pd**

**Hj. SUKMAWATI, S.STP, MM**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya implementasi pengarus utamaan gender pada SKPD kabupaten Sinjai	Jumlah Partisipasi perempuan dalam bidang pembangunan	6.200 orang

PROGRAM(a)	ANGGARAN(b)	KETERANGAN(c)
1. Program Kesetaraan dan Data Gender	Rp123.675.000	

SINJAI, FEBRUARI 2018

KEPALA DINAS  
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
 PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN  
 PENDUDUK DAN KB

KEPALA BIDANG  
 KESETARAAN DAN DATA GENDER

**Dra. Hj. MAS ATI, M.Si, M.Pd**

**Hj. SUKMAWATI, S.STP, MM**



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
*Jl. Jend. Ahmad Yani No. 1 Sinjai 92611*

---

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJATAHUN 2018

DALAM RANGKA MEWUJUDKAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF TRANSPARAN DAN AKUNTABEL SERTA BERORIENTASI PADA HASIL KAMI YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :

NAMA : ASRINI SUSANTI, ST

JABATAN : KEPALA SEKSI DATA DAN INFORMASI GENDER DAN ANAK

SELANJUTNYA DISEBUT PIHAK PERTAMA

NAMA : HJ. SUKMAWATI, S.STP, MM

JABATAN : KEPALA BIDANG KESETARAAN DAN DATA GENDER

SELAKU ATASAN PIHAK PERTAMA SELANJUTNYA DISEBUT PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA BERJANJI MEWUJUDKAN TARGET KINERJA YANG SEHARUSNYA SESUAI LAMPIRAN PERJANJIAN INI, DALAM RANGKA MENCAPAI TARGET KINERJA JANGKA MENENGAH SEPERTI YANG TELAH DITETAPKAN DALAM DOKUMEN PERENCANAAN.

KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA TERSEBUT MENJADI TANGGUNG JAWAB KAMI.

PIHAK KEDUA AKAN MELAKUKAN SUPERVISI YANG DILAKUKAN SERTA AKAN MELAKUKAN EVALUASI TERHADAP CAPAIAN KINERJA DARI PERJANJIAN INI DAN MENGAMBIL TINDAKAN YANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SAKSI.

SINJAI, FEBRUARI 2018

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

**Hj. SUKMAWATI, S.STP, MM**

**ASRINI SUSANTI, ST**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya implementasi pengarusutamaan gender pada SKPD kabupaten Sinjai	Jumlah Partisipasi perempuan dalam bidang pembangunan	6.200 orang

KEGIATAN(a)	ANGGARAN(b)	KETERANGAN(c)
1. Pendampingan Focal Point PUG	Rp26.500.000	
2. Up Dating Data Gender dan Anak	Rp17.000.000	
3. Peningkatan Peran Serta Organisasi Perempuan	Rp44.975.000.	

SINJAI, FEBRUARI 2018

KEPALA BIDANG  
KESETARAAN DAN DATA GENDER

KEPALA SEKSI DATA  
DAN INFORMASI GENDER DAN ANAK

**Hj. SUKMAWATI, S.STP, M**

**MASRINI SUSANTI, ST**



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
*Jl. Jend. Ahmad Yani No. 1 Sinjai 92611*

---

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

DALAM RANGKA MEWUJUDKAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF TRANSPARAN DAN AKUNTABEL SERTA BERORIENTASI PADA HASIL KAMI YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :

NAMA : HJ. HARMING S. Ip

JABATAN : KEPALA SEKSI KESETARAAN GENDER DALAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

SELANJUTNYA DISEBUT PIHAK PERTAMA

NAMA : HJ. SUKMAWATI, S.STP, MM

JABATAN : KEPALA BIDANG KESETARAAN DAN DATA GENDER

SELAKU ATASAN PIHAK PERTAMA SELANJUTNYA DISEBUT PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA BERJANJI MEWUJUDKAN TARGET KINERJA YANG SEHARUSNYA SESUAI LAMPIRAN PERJANJIAN INI, DALAM RANGKA MENCAPAI TARGET KINERJA JANGKA MENENGAH SEPerti YANG TELAH DITETAPKAN DALAM DOKUMEN PERENCANAAN.

KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA TERSEBUT MENJADI TANGGUNG JAWAB KAMI.

PIHAK KEDUA AKAN MELAKUKAN SUPERVISI YANG DILAKUKAN SERTA AKAN MELAKUKAN EVALUASI TERHADAP CAPAIAN KINERJA DARI PERJANJIAN INI DAN MENGAMBIL TINDAKAN YANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SAKSI.

SINJAI, FEBRUARI 2018

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

**HJ. SUKMAWATI, S.STP, MM**

**HJ. HARMING, S.IP**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya implementasi pengarus utamaan gender pada SKPD kabupaten Sinjai	Jumlah Partisipasi perempuan dalam bidang pembangunan	6.200 orang

KEGIATAN(a)	ANGGARAN(b)	KETERANGAN(c)
Fasilitasi Temu Organisasi Perempuan Tingkat Kabupaten	Rp35.200.000	

SINJAI, FEBRUARI 2018

KEPALA BIDANG  
KESETARAAN DAN DATA GENDER

KEPALA SEKSI  
KESETARAAN GENDER DALAM  
PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

**HJ. SUKMAWATI, S.STP, MM**

**HJ. HARMING S. Ip**



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
*Jl. Jend. Ahmad Yani No. 1 Sinjai 92611*

---

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

DALAM RANGKA MEWUJUDKAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF TRANSPARAN DAN AKUNTABEL SERTA BERORIENTASI PADA HASIL KAMI YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :

NAMA : HAERUL SALEH, SKM. MM.

JABATAN : KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN

SELANJUTNYA DISEBUT PIHAK PERTAMA

NAMA : Dra. Hj. MAS ATI, M.Si, M.Pd

JABATAN : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA

SELAKU ATASAN PIHAK PERTAMA SELANJUTNYA DISEBUT PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA BERJANJI MEWUJUDKAN TARGET KINERJA YANG SEHARUSNYA SESUAI LAMPIRAN PERJANJIAN INI, DALAM RANGKA MENCAPAI TARGET KINERJA JANGKA MENENGAH SEPerti YANG TELAH DITETAPKAN DALAM DOKUMEN PERENCANAAN.

KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA TERSEBUT MENJADI TANGGUNG JAWAB KAMI.

PIHAK KEDUA AKAN MELAKUKAN SUPERVISI YANG DILAKUKAN SERTA AKAN MELAKUKAN EVALUASI TERHADAP CAPAIAN KINERJA DARI PERJANJIAN INI DAN MENGAMBIL TINDAKAN YANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SAKSI.

SINJAI, FEBRUARI 2018

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

**Dra. Hj. MAS ATI, M.Si, M.Pd**

**HAERUL SALEH, SKM. MM**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
	Meningkatkan Kepesertaan KB dan Ketahanan Keluarga	Meningkatnya kesertaan ber-KB bagi PUS (Pasangan Usia Subur)	500 Peserta Baru

PROGRAM (a)	ANGGARAN(b)	KETERANGAN(c)
Program Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan	Rp2.630.106.000	

SINJAI, FEBRUARI 2018

KEPALA DINAS  
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
 PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN  
 PENGGERAKANPENDUDUK DAN KB

KEPALA BIDANG  
 PENGENDALIAN PENDUDUK,  
 PENYULUHAN DAN

**Dra. Hj. MAS ATI, M.Si, M.Pd**

**HAERUL SALEH, SKM. MM**



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
*Jl. Jend. Ahmad Yani No. 1 Sinjai 92611*

---

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

DALAM RANGKA MEWUJUDKAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF TRANSPARAN DAN AKUNTABEL SERTA BERORIENTASI PADA HASIL KAMI YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :

NAMA : Hj. St. RAHMIAH, S.Pd

JABATAN : KEPALA SEKSI ADVOKASI DAN PENGGERAKAN

SELANJUTNYA DISEBUT PIHAK PERTAMA

NAMA : HAERUL SALEH, SKM. MM

JABATAN : KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN

SELAKU ATASAN PIHAK PERTAMA SELANJUTNYA DISEBUT PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA BERJANJI MEWUJUDKAN TARGET KINERJA YANG SEHARUSNYA SESUAI LAMPIRAN PERJANJIAN INI, DALAM RANGKA MENCAPAI TARGET KINERJA JANGKA MENENGAH SEPerti YANG TELAH DITETAPKAN DALAM DOKUMEN PERENCANAAN.

KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA TERSEBUT MENJADI TANGGUNG JAWAB KAMI.

PIHAK KEDUA AKAN MELAKUKAN SUPERVISI YANG DILAKUKAN SERTA AKAN MELAKUKAN EVALUASI TERHADAP CAPAIAN KINERJA DARI PERJANJIAN INI DAN MENGAMBIL TINDAKAN YANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SAKSI.

SINJAI, FEBRUARI 2018

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

**HAERUL SALEH, SKM. MM**

**Hj. St. RAHMIAH, S.Pd**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kesertaan ber-KB bagi PUS (Pasangan Usia Subur)	Rasio Akseptor KB	2.450 peserta baru

KEGIATAN(a)	ANGGARAN(b)	KETERANGAN(c)
1. Temu Kader Pengelola Program KKBPK	Rp39.750.000	
2. Penyediaan Biaya Operasional Integrasi Program KKBPK pada kampung KB	Rp809.730.000	
3. Penyediaan Dukungan Media KIE dan Manajemen BOKB	Rp180.450.000	

SINJAI, FEBRUARI 2018

KEPALA BIDANG            KEPALA SEKSI  
PENGENDALIAN PENDUDUK, ADVOKASI DAN PENGGERAKAN  
PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN

**HAERUL SALEH, SKM. MM**

**Hj. St. RAHMIAH, S.Pd**



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
*Jl. Jend. Ahmad Yani No. 1 Sinjai 92611*

---

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

DALAM RANGKA MEWUJUDKAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF TRANSPARAN DAN AKUNTABEL SERTA BERORIENTASI PADA HASIL KAMI YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :

NAMA : AMIRUDDIN NUR

JABATAN : KEPALA SEKSI PENYULUHAN DAN PENDAYAGUNAAN PETUGAS  
LAPANGAN KELUARGA BERENCANA

SELANJUTNYA DISEBUT PIHAK PERTAMA

NAMA : HAERUL SALEH, SKM. MM

JABATAN : KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN DAN  
PENGGERAKAN

SELAKU ATASAN PIHAK PERTAMA SELANJUTNYA DISEBUT PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA BERJANJI MEWUJUDKAN TARGET KINERJA YANG SEHARUSNYA SESUAI LAMPIRAN PERJANJIAN INI, DALAM RANGKA MENCAPAI TARGET KINERJA JANGKA MENENGAH SEPERTI YANG TELAH DITETAPKAN DALAM DOKUMEN PERENCANAAN.

KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA TERSEBUT MENJADI TANGGUNG JAWAB KAMI.

PIHAK KEDUA AKAN MELAKUKAN SUPERVISI YANG DILAKUKAN SERTA AKAN MELAKUKAN EVALUASI TERHADAP CAPAIAN KINERJA DARI PERJANJIAN INI DAN MENGAMBIL TINDAKAN YANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SAKSI.

SINJAI, FEBRUARI 2018

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

**HAERUL SALEH, SKM. MM**

**AMIRUDDIN NUR**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kesertaan ber-KB bagi PUS (Pasangan Usia Subur)	Rasio Akseptor KB	2.450 peserta baru

KEGIATAN(a)	ANGGARAN(b)	KETERANGAN(c)
Penguatan Lini Lapangan Keluarga Berencana	Rp 329.600.000,00	
Penyediaan Biaya Operasional Balai Penyuluhan KB	Rp 653.076.000,00	
Penyediaan Biaya Operasional KIE oleh PPKBD dan Sub PPKBD	Rp 576.000.000,00	

SINJAI, FEBRUARI 2018

KEPALA BIDANG  
 PENGENDALIAN PENDUDUK,  
 PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN

KEPALA SEKSI PENYULUHAN  
 DAN PENDAYAGUNAAN PETUGAS  
 LAPANGANKELUARGA BERENCANA

**HAERUL SALEH, SKM. MM**

**AMIRUDDIN NUR**



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
*Jl. Jend. Ahmad Yani No. 1 Sinjai 92611*

---

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

DALAM RANGKA MEWUJUDKAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF TRANSPARAN DAN AKUNTABEL SERTA BERORIENTASI PADA HASIL KAMI YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :

NAMA : AKMAL, S. Ag

JABATAN : KEPALA SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK DAN INFORMASI  
KELUARGA

SELANJUTNYA DISEBUT PIHAK PERTAMA

NAMA : HAERUL SALEH, SKM. MM

JABATAN : KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN DAN  
PENGGERAKAN

SELAKU ATASAN PIHAK PERTAMA SELANJUTNYA DISEBUT PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA BERJANJI MEWUJUDKAN TARGET KINERJA YANG SEHARUSNYA SESUAI LAMPIRAN PERJANJIAN INI, DALAM RANGKA MENCAPAI TARGET KINERJA JANGKA MENENGAH SEPERTI YANG TELAH DITETAPKAN DALAM DOKUMEN PERENCANAAN.

KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA TERSEBUT MENJADI TANGGUNG JAWAB KAMI.

PIHAK KEDUA AKAN MELAKUKAN SUPERVISI YANG DILAKUKAN SERTA AKAN MELAKUKAN EVALUASI TERHADAP CAPAIAN KINERJA DARI PERJANJIAN INI DAN MENGAMBIL TINDAKAN YANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SAKSI.

SINJAI, FEBRUARI 2018

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

**HAERUL SALEH, SKM. MM**

**AKMAL, S.Ag**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kesertaan ber-KB bagi PUS (Pasangan Usia Subur)	Rasio Akseptor KB	2.450 peserta baru

KEGIATAN(a)	ANGGARAN(b)	KETERANGAN(c)
Pemutakhiran Data Keluarga	Rp 41.500.000,00	

SINJAI, FEBRUARI 2018

KEPALA BIDANG  
 PENGENDALIAN PENDUDUK,  
 PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN

KEPALA SEKSI  
 PENGENDALIAN PENDUDUK,DAN  
 INFORMASI KELUARGA

**HAERUL SALEH, SKM. MM**

**AKMAL, S.Ag**



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
*Jl. Jend. Ahmad Yani No. 1 Sinjai 92611*

---

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

DALAM RANGKA MEWUJUDKAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF TRANSPARAN DAN AKUNTABEL SERTA BERORIENTASI PADA HASIL KAMI YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :

NAMA : Drs. RAMLI P

JABATAN : KEPALA BIDANG KELUARGA BERENCANA, KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

SELANJUTNYA DISEBUT PIHAK PERTAMA

NAMA : Dra. Hj. MAS ATI, M.Si, M.Pd

JABATAN : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

SELAKU ATASAN PIHAK PERTAMA SELANJUTNYA DISEBUT PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA BERJANJI MEWUJUDKAN TARGET KINERJA YANG SEHARUSNYA SESUAI LAMPIRAN PERJANJIAN INI, DALAM RANGKA MENCAPAI TARGET KINERJA JANGKA MENENGAH SEPERTI YANG TELAH DITETAPKAN DALAM DOKUMEN PERENCANAAN.

KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA TERSEBUT MENJADI TANGGUNG JAWAB KAMI.

PIHAK KEDUA AKAN MELAKUKAN SUPERVISI YANG DILAKUKAN SERTA AKAN MELAKUKAN EVALUASI TERHADAP CAPAIAN KINERJA DARI PERJANJIAN INI DAN MENGAMBIL TINDAKAN YANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SAKSI.

SINJAI, FEBRUARI 2018

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

**Dra. Hj. MAS ATI, M.Si, M.Pd**

**Drs. RAMLI P**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Jumlah kesertaan dalam kelompok ketahanan keluarga	BKB : 3.100 BKR : 2.000 BKL : 1.700 UPPKS : 200 PIK R : 940

KEGIATAN(a)	ANGGARAN(b)	KETERANGAN(c)
Program Keluarga Berencana	Rp 876.134.000,00	

SINJAI, FEBRUARI 2018

KEPALA DINAS  
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
 PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN  
 KESEJAHTERAAN PENDUDUK DAN KB

KEPALA BIDANG  
 KELUARGA BERENCANA,  
 KETAHANAN DAN  
 KELUARGA

**Dra. Hj. MAS ATI, M.Si, M.Pd**

**Drs. RAMLI P**



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
*Jl. Jend. Ahmad Yani No. 1 Sinjai 92611*

---

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

DALAM RANGKA MEWUJUDKAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF TRANSPARAN DAN AKUNTABEL SERTA BERORIENTASI PADA HASIL KAMI YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :

NAMA : HAERIAH WARIS, S. Kep, Ns,MM

JABATAN : KEPALA SEKSI PEMENUHAN KEBUTUHAN BER-KB

SELANJUTNYA DISEBUT PIHAK PERTAMA

NAMA : Drs. RAMLI P

JABATAN:KEPALA BIDANG KELUARGA BERENCANA, KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

SELAKU ATASAN PIHAK PERTAMA SELANJUTNYA DISEBUT PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA BERJANJI MEWUJUDKAN TARGET KINERJA YANG SEHARUSNYA SESUAI LAMPIRAN PERJANJIAN INI, DALAM RANGKA MENCAPAI TARGET KINERJA JANGKA MENENGAH SEPerti YANG TELAH DITETAPKAN DALAM DOKUMEN PERENCANAAN.

KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA TERSEBUT MENJADI TANGGUNG JAWAB KAMI.

PIHAK KEDUA AKAN MELAKUKAN SUPERVISI YANG DILAKUKAN SERTA AKAN MELAKUKAN EVALUASI TERHADAP CAPAIAN KINERJA DARI PERJANJIAN INI DAN MENGAMBIL TINDAKAN YANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SAKSI.

SINJAI, FEBRUARI 2018

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

**Drs. RAMLI P**

**HAERIAH WARIS, S. Kep, Ns,MM**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Jumlah kesertaan dalam kelompok ketahanan keluarga	BKB : 3.100 BKR : 2.000 BKL : 1.700 UPPKS : 200 PIK R : 940

KEGIATAN(a)	ANGGARAN(b)	KETERANGAN(c)
Penyediaan Biaya Operasional Distribusi Alat Kontasepsi	Rp 20.034.000,00	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan Pelayanan KB	Rp 780.000.000,00	

SINJAI, FEBRUARI 2018

KEPALA BIDANG  
 KELUARGA BERENCANA, KETAHANAN  
 DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

KEPALA SEKSI  
 PEMENUHAN KEBUTUHAN BER-KB

**Drs. RAMLI P**

**HAERIAH WARIS, S. Kep, Ns,MM**



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
*Jl. Jend. Ahmad Yani No. 1 Sinjai 92611*

---

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

DALAM RANGKA MEWUJUDKAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF TRANSPARAN DAN AKUNTABEL SERTA BERORIENTASI PADA HASIL KAMI YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :

NAMA : RUKMINI, S. ST,M. Keb

JABATAN : KEPALA SEKSI PEMBINAAN KESERTAAN BER-KB

SELANJUTNYA DISEBUT PIHAK PERTAMA

NAMA : Drs. RAMLI P

JABATAN :KEPALA BIDANG KELUARGA BERENCANA, KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

SELAKU ATASAN PIHAK PERTAMA SELANJUTNYA DISEBUT PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA BERJANJI MEWUJUDKAN TARGET KINERJA YANG SEHARUSNYA SESUAI LAMPIRAN PERJANJIAN INI, DALAM RANGKA MENCAPAI TARGET KINERJA JANGKA MENENGAH SEPERTI YANG TELAH DITETAPKAN DALAM DOKUMEN PERENCANAAN.

KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA TERSEBUT MENJADI TANGGUNG JAWAB KAMI.

PIHAK KEDUA AKAN MELAKUKAN SUPERVISI YANG DILAKUKAN SERTA AKAN MELAKUKAN EVALUASI TERHADAP CAPAIAN KINERJA DARI PERJANJIAN INI DAN MENGAMBIL TINDAKAN YANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SAKSI.

SINJAI, FEBRUARI 2018

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

**Drs. RAMLI P**

**RUKMINI, S. ST,M. Keb**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Jumlah kesertaan dalam kelompok ketahanan keluarga	BKB : 3.100 BKR : 2.000 BKL : 1.700 UPPKS : 200 PIK R : 940

KEGIATAN(a)	ANGGARAN(b)	KETERANGAN(c)
Pelayanan Bulan Bhakti TNI Manunggal KB-Kesehatan	Rp 22.100.000,00	
Pelayanan Bulan Bhakti Kesatuan Gerak PKK KB-Kesehatan	Rp 21.300.000,00	

SINJAI, FEBRUARI 2018

KEPALA BIDANG  
 KELUARGA BERENCANA, KETAHANAN  
 DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

KEPALA SEKSI  
 PEMBINAAN KESERTAAN BER-KB

**Drs. RAMLI P**

**RUKMINI, S. ST, M. Keb**



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
*Jl. Jend. Ahmad Yani No. 1 Sinjai 92611*

---

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

DALAM RANGKA MEWUJUDKAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF TRANSPARAN DAN AKUNTABEL SERTA BERORIENTASI PADA HASIL KAMI YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :

NAMA : SRI ASTINI,S. Sos

JABATAN : KEPALA SEKSI KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

SELANJUTNYA DISEBUT PIHAK PERTAMA

NAMA : Drs. RAMLI P

JABATAN : KEPALA BIDANG KELUARGA BERENCANA, KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

SELAKU ATASAN PIHAK PERTAMA SELANJUTNYA DISEBUT PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA BERJANJI MEWUJUDKAN TARGET KINERJA YANG SEHARUSNYA SESUAI LAMPIRAN PERJANJIAN INI, DALAM RANGKA MENCAPAI TARGET KINERJA JANGKA MENENGAH SEPERTI YANG TELAH DITETAPKAN DALAM DOKUMEN PERENCANAAN.

KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA TERSEBUT MENJADI TANGGUNG JAWAB KAMI.

PIHAK KEDUA AKAN MELAKUKAN SUPERVISI YANG DILAKUKAN SERTA AKAN MELAKUKAN EVALUASI TERHADAP CAPAIAN KINERJA DARI PERJANJIAN INI DAN MENGAMBIL TINDAKAN YANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SAKSI.

SINJAI, FEBRUARI 2018

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

**Drs. RAMLI P**

**SRI ASTINI,S. Sos**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Jumlah kesertaan dalam kelompok ketahanan keluarga	BKB : 3.100 BKR : 2.000 BKL : 1.700 UPPKS : 200 PIK R : 940

KEGIATAN(a)	ANGGARAN(b)	KETERANGAN(c)
Pembinaan Kelompok Tribina	Rp 32.700.000,00	

SINJAI, FEBRUARI 2018

KEPALA BIDANG  
KELUARGA BERENCANA, KETAHANAN DAN  
KETAHANAN DAN  
KELUARGAKESEJAHTERAAN KELUARGA

KEPALA SEKSI  
KESEJAHTERAAN

**Drs. RAMLI P**

**SRI ASTINI,S. Sos**



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

*Jl. Jend. Ahmad Yani No. 1 Sinjai 92611*

---

---

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJATAHUN 2018**

DALAM RANGKA MEWUJUDKAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF TRANSPARAN DAN AKUNTABEL SERTA BERORIENTASI PADA HASIL KAMI YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :

NAMA : A. MULIATI ANWAR, S,Sos. MH.

JABATAN : KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

SELANJUTNYA DISEBUT PIHAK PERTAMA

NAMA : Dra. Hj. MAS ATI, M.Si, M.Pd

JABATAN : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA

SELAKU ATASAN PIHAK PERTAMA SELANJUTNYA DISEBUT PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA BERJANJI MEWUJUDKAN TARGET KINERJA YANG SEHARUSNYA SESUAI LAMPIRAN PERJANJIAN INI, DALAM RANGKA MENCAPAI TARGET KINERJA JANGKA MENENGAH SEPERTI YANG TELAH DITETAPKAN DALAM DOKUMEN PERENCANAAN.

KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA TERSEBUT MENJADI TANGGUNG JAWAB KAMI.

PIHAK KEDUA AKAN MELAKUKAN SUPERVISI YANG DILAKUKAN SERTA AKAN MELAKUKAN EVALUASI TERHADAP CAPAIAN KINERJA DARI PERJANJIAN INI DAN MENGAMBIL TINDAKAN YANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SAKSI.

SINJAI, FEBRUARI 2018

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

**Dra. Hj. MAS ATI, M.Si, M.Pd**

**A. MULIATI ANWAR, S,Sos. MH**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya penyediaan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, serta pemenuhan hak anak	Presentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di kabupaten sinjai	100%
		Persentase persiapan sinjai menuju kabupaten layak anak.	100%

KEGIATAN(a)	ANGGARAN(b)	KETERANGAN(c)
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rp 164.950.000,00	

SINJAI, FEBRUARI 2018

KEPALA DINAS  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KB

KEPALA BIDANG  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN  
DAN ANAK

**Dra. Hj. MAS ATI, M.Si, M.Pd**

**A. MULIATI ANWAR, S.Sos. MH**



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
*Jl. Jend. Ahmad Yani No. 1 Sinjai 92611*

---

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

DALAM RANGKA MEWUJUDKAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF TRANSPARAN DAN AKUNTABEL SERTA BERORIENTASI PADA HASIL KAMI YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :

NAMA : RAFIUDDIN, S.Sos

JABATAN : KEPALA SEKSI PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

SELANJUTNYA DISEBUT PIHAK PERTAMA

NAMA : A. MULIATI ANWAR, S,Sos. MH

JABATAN : KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

SELAKU ATASAN PIHAK PERTAMA SELANJUTNYA DISEBUT PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA BERJANJI MEWUJUDKAN TARGET KINERJA YANG SEHARUSNYA SESUAI LAMPIRAN PERJANJIAN INI, DALAM RANGKA MENCAPAI TARGET KINERJA JANGKA MENENGAH SEPERTI YANG TELAH DITETAPKAN DALAM DOKUMEN PERENCANAAN.

KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA TERSEBUT MENJADI TANGGUNG JAWAB KAMI.

PIHAK KEDUA AKAN MELAKUKAN SUPERVISI YANG DILAKUKAN SERTA AKAN MELAKUKAN EVALUASI TERHADAP CAPAIAN KINERJA DARI PERJANJIAN INI DAN MENGAMBIL TINDAKAN YANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SAKSI.

SINJAI, FEBRUARI 2018

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

**A. MULIATI ANWAR, S,Sos. MH**

**RAFIUDDIN, S.Sos**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya penyediaan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, serta pemenuhan hak anak	Persentase persiapan sinjai menuju kabupaten layak anak.	100%

KEGIATAN(a)	ANGGARAN(b)	KETERANGAN (c)
Penguatan dan Pengembangan Forum anak Kabupaten Sinjai	Rp 86.100.000,00	
Pembinaan Kabupaten Layak Anak	Rp 31.650.000,00	

SINJAI, FEBRUARI 2018

KEPALA BIDANG  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN,  
DAN ANAK

KEPALA SEKSI  
PEMENUHAN HAK DAN  
PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

**A. MULIATI ANWAR, S.Sos. MH**

**RAFIUDDIN, S.Sos**



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

*Jl. Jend. Ahmad Yani No. 1 Sinjai 92611*

---

---

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

DALAM RANGKA MEWUJUDKAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF TRANSPARAN DAN AKUNTABEL SERTA BERORIENTASI PADA HASIL KAMI YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :

NAMA : Hj. SUATI, S.Pd

JABATAN : KEPALA SEKSI PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

SELANJUTNYA DISEBUT PIHAK PERTAMA

NAMA : A. MULIATI ANWAR, S,Sos. MH.

JABATAN : KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

SELAKU ATASAN PIHAK PERTAMA SELANJUTNYA DISEBUT PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA BERJANJI MEWUJUDKAN TARGET KINERJA YANG SEHARUSNYA SESUAI LAMPIRAN PERJANJIAN INI, DALAM RANGKA MENCAPAI TARGET KINERJA JANGKA MENENGAH SEPerti YANG TELAH DITETAPKAN DALAM DOKUMEN PERENCANAAN.

KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA TERSEBUT MENJADI TANGGUNG JAWAB KAMI.

PIHAK KEDUA AKAN MELAKUKAN SUPERVISI YANG DILAKUKAN SERTA AKAN MELAKUKAN EVALUASI TERHADAP CAPAIAN KINERJA DARI PERJANJIAN INI DAN MENGAMBIL TINDAKAN YANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SAKSI.

SINJAI, FEBRUARI 2018

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

**A. MULIATI ANWAR, S.Sos. MH**

**Hj. SUATI, S.Pd**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya penyediaan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, serta pemenuhan hak anak	Presentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di kabupaten sinjai	100%

KEGIATAN(a)	ANGGARAN(b)	KETERANGAN(c)
Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Rp 47.200.000,00	

SINJAI, FEBRUARI 2018

KEPALA BIDANG  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN  
DAN ANAK

KEPALA SEKSI  
PELAYANAN TERPADU  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN  
ANAK

**A. MULIATI ANWAR, S.Sos. MH**

**Hj. SUATI, S.Pd**